

**ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PAJAK  
REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**Nama : BASTAR AGUNG PRAYOGA**  
**NPM : 1405170784**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : **BASTAR AGUNG PRAYOGA**  
NPM : **1405170784**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

Dinyatakan : **(C)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Penguji II

**Dr. Hj. MAYA SARI S.E., Ak, CA, M.Si**

**ISNA ARDILA, S.E., M.Si**

Pembimbing

**IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**H. JANURI, S.E., M.M., M.Si**

**ADE GUNAWAN, S.E., M.Si**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

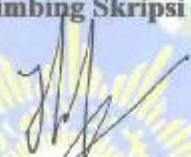
Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **BASTAR AGUNG PRAYOGA**  
NPM : 1405170784  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
Judul Skripsi : **ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN  
PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

  
**IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si**

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
**FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.**

  
**H. JANURI, SE, M.M, M.Si.**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : BASTAR AGUNG PRAYOGA  
NPM : 1405170784  
JURUSAN : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN  
PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
	Diterima		
	- pembahasan talk akurat		
	- sesuai fan dgn kesimpulan		
	- Rumusan masalah hrs		
	terjawab!		
10/10/18	perbaiki		
12/10/18	Diterima		
	- hasil penelitian		
	- pembahasan		
	- kesimpulan & saran		
	Acc meja hijau!		

Medan, Oktober 2018

Diketahui/Disetujui

Ketua Jurusan

Pembimbing Skripsi

IKHSAN ABDULLAH, SE., M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## **ABSTRAK**

### **Bastar Agung Prayoga (1405170784) Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Langkat. Untuk mengetahui penyebab tingkat penerimaan Pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Langkat pada tahun 2013 sampai 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu data yang digunakan untuk menganalisis data, dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul sehingga memperoleh gambaran yang lengkap tentang masalah yang diteliti.

Dari hasil pembahasan maka dapat dilihat bahwa anggaran belum berjalan dengan baik sebagai alat pengawasan pajak reklame hal ini disebabkan karena setiap tahunnya realisasi pajak reklame tidak mencapai target anggaran pajak reklame. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya nilai dari pendapatan asli daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah yang sah yang belum dapat memenuhi target setiap tahunnya.

**Kata Kunci : Anggaran, Pengawasan, Pajak Reklame**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat “.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih Ayahanda Suherlan dan Ibunda Nuraidah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri S.E., MM., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Ibu Zulia Hanum S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ikhsan Abdullah, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Sahabat penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, September 2018

Bastar Agung Prayoga  
1405170784

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	6

### **BAB II LANDASAN TEORI ..... 8**

A. Uraian Teoritis.....	8
1. Anggaran .....	8
a. Pengertian Kas.....	8
b. Tujuan dan Manfaat Anggaran .....	9
c. Fungsi Anggaran .....	11
2. Pengawasan.....	12
a. Pengertian Pengawasan.....	12
b. Karakteristik Pengawasan.....	13
c. Tipe-Tipe Proses Pengawasan.....	15
3. Pajak .....	17

a. Pengertian Pajak Reklame .....	17
b. Sistem Pengendalian Intern Pada Pengeluaran Kas .....	18
4. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kerangka Berpikir .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	25
B. Definisi Operasional .....	25
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	26
D. Jenis Dan Sumber Data .....	26
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	27
F. Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan .....	41
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak reklame.....	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian .....	26
Tabel IV.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Stabat .	35
Tabel IV.2	Data Anggaran Pajak reklame Pada Kota Stabat .....	36
Tabel IV.3	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir .....	30
-------------	-------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari setiap sektor pajak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat diketahui setiap rencana Pendapatan Negara dari sektor pajak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor ini yang akan digunakan untuk pembiayaan setiap pembangunan yang akan berjalan maupun pembangunan yang sedang berjalan dan juga pendapatan negara dari sektor ini akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Perolehan yang meningkat setiap tahunnya akan dapat terwujud dengan adanya pengelolaan sumber daya yang efisien dan mendukung untuk pembangunan yang mensejahterahkan masyarakatnya. Seperti Indonesia yang merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas Desentralisasi dalam pemerintahan dan juga yang merupakan salah satu negara berkembang harus terus melakukan pembangunan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya pembangunan yang terus dilakukan maka akan terpenuhinya kebutuhan bagi rakyat. Hal ini dapat terwujud juga dengan adanya upaya pemanfaatan dari masing – masing daerah, maka pembangunan harus lebih diarahkan ke daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah, ditetapkan bahwa penerimaan Negara dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan, Sumber penerimaan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :

1) Hasil pajak daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, contohnya pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak hotel, dan lain-lain

2) Hasil retribusi daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4) Lain-lain PAD yang sah

5) Dana perimbangan; dan

6) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam undang-undang tersebut, memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mewujudkan otonomi di daerah, kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting karena sesuai dengan azas desentralisasi daerah kabupaten dan kota sebagai otonomi daerah otonom berhak mengatur secara financial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah yang salah satu sumbernya adalah Pajak Reklame, merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk mewujudkan pembangunan daerah. Pajak reklame juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan.

Pemungutan dalam pajak reklame dilakukan tidak sembarangan, yakni sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan yang tidak mempengaruhi reklame tersebut seperti dari segi nilai sewa, dan melalui letak strategis reklame. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi pembangunan daerah.

Menurut Julita dan Jufrizen (2014, hal 7) Anggaran adalah "Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Menurut Hehanusa (2013, hal.47) Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan/pemerintah. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai.

Pengawasan merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.

Berikut ini adalah data realisasi dan target penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 3 tahun.

**Tabel I-1**  
**Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak reklame Beserta**  
**Penerimaan PAD Kab. Langkat**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>PAD</b>	<b>Capaian %</b>
2015	163.107.811	143.520.000	592.759.706.798	87
2016	216.659.656	197.042.000	610.439.739.490	80
2017	269.333.925	250.916.160	676.540.322.667	75

**Sumber Data : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat**

Berdasarkan tabel I.1 laporan target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat, fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target hal ini menunjukkan pengawasan anggaran yang dilakukan belum berjalan dengan baik sementara menurut peraturan Bupati Langkat Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan menurut Siagian (2002:259), “Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik

dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi dengan tingkat efektifitas yang setinggi mungkin.”

Berdasarkan tabel I.1 juga menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dalam merealisasikan pajak reklame belum maksimal, terlihat dari tahun 2015 s/d 2017 belum mampu tercapainya target atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Nafarin (2009, Hal 30) Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara - Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) - Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).”

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2010) Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan dengan baik.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel pendapatan asli daerah sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pajak

reklame, objek penelitian terdahulu dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, sementara objek penelitian ini dilakukan pada Dispenda Kabupaten Langkat.

Berdasarkan dari latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak reklame dari tahun 2015 sampai dengan 2017 belum tercapainya target yang telah ditentukan.
2. Kemampuan pengawasan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dalam merealisasikan pajak reklame belum maksimal.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di dapat adalah :

1. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Langkat ?
2. Mengapa tingkat penerimaan Pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Langkat pada tahun 2015 sampai 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan ?

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Langkat.
2. Untuk mengetahui penyebab tingkat penerimaan Pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Langkat pada tahun 2013 sampai 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan

### **Manfaat penelitian**

1. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame.

2. Bagi pihak Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Anggaran**

###### **a. Pengertian Anggaran**

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*). Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Munandar (2015, hal.11), “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang”.

Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

Sedangkan Bastari (2015, hal.173), “Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan”. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi”.

Nafarin (2013, hal.11) “Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

#### **b. Tujuan dan Manfaat Anggaran**

Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Parulian (2013, hal.30) tujuan yang terkait dengan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

##### 1) Perencanaan

Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan

##### 2) Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan

##### 3) Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.

#### 4) Pengendalian

Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.

Secara sistematis anggaran mempunyai tujuan yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013, hal.19), antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- 2) Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- 3) Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- 4) Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan di perusahaan.

Menurut Nafarin (2013, hal.19), anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain :

- 1) Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
- 2) Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
- 3) Dapat memotivasi pegawai.
- 4) Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.
- 5) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- 6) Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

### c. Fungsi Anggaran

Dalam upaya mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuannya tersebut. Maka anggaran sangat diperlukan dalam suatu perusahaan, berikut adalah beberapa fungsi anggaran.

Menurut Nafarin (2013, hal.5), seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi :

- 1) **Planning (Perencanaan)**  
Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang. termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya
- 2) **Organizing (Pengorganisasian)**  
Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.
- 3) **Actuating (Menggerakkan)**  
Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber daya yang ada harus dikerahkan, dikoordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.
- 4) **Controlling (Pengendalian)**  
Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan

upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efektif dan efisien.

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut.

Menurut Sasongko dan Parulian (2015, hal.3) kelompok fungsi anggaran yaitu:

- 1) Perencanaan Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
- 2) Koordinasi Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan.
- 3) Motivasi Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
- 4) Pengendalian Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian.

## **2. Pendapatan Daerah**

### **a. Pengertian Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah menurut Pasal 20 ayat 1 huruf a terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 pasal 1 angka 15 adalah sebagai berikut: “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.”

Sedangkan Menurut Abdul Halim (2002:64), pendapatan adalah : “Semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan daerah merupakan sebuah rencana yang menargetkan pendapatan yang akan diperoleh sehingga dapat diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diperoleh oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai

alternatif dalam memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

#### **b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi

daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda). UU No.34 Tahun 2000 tersebut memberikan peluang kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dampak yang timbul kemudian adalah banyaknya bermunculan Perda-perda baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan ekonomi dan investasi secara nasional. Selain itu, Perda-perda baru tersebut menimbulkan terjadinya pungutan-pungutan yang pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang memberatkan ekonomi nasional.

Namun demikian berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah diberikan mandat untuk memonitor dan mengevaluasi perda DPRD. Pada kenyataannya kewenangan yang diberikan kepada Daerah tersebut memberikan dampak banyaknya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut yang dibatalkan oleh pemerintah, karena dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan mengganggu iklim investasi dan usaha di daerah sehingga memberatkan pelaku usaha. Ketentuan tentang penerbitan Peraturan Daerah yang harus mendapatkan pengesahan dari Pusat dirasakan telah mengurangi makna otonomi daerah sebagai perwujudan kemandirian daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Halim (2004:67), “PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”. Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2004:67) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

### **1) Pajak Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2003:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Menurut Halim (2004:67), “pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain ialah:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan

- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak parkir

## 2) Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Halim (2004:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah”. Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi 2, yakni:

- a) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu
- b) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha. (Kadjatmiko, 2002:78).

Menurut Halim (2004:68) Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi pergantian biaya cetak KTP

- d) Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil
- e) Retribusi pelayanan pemakaman
- f) Retribusi pelayanan pengabuan mayat
- g) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- h) Retribusi pelayanan pasar
- i) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- j) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- k) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- l) Retribusi pengujian kapal perikanan
- m) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- n) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- o) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- p) Retribusi jasa usaha terminal
- q) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- r) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- s) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
- t) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
- u) Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal
- v) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga
- w) Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air
- x) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
- y) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- z) Retribusi izin mendirikan bangunan
- aa) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

bb) Retribusi izin gangguan

cc) Retribusi izin trayek

## **2. Pengawasan**

### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan bisa di defenisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Menurut Halim dan Kusufi (2013, hal. 88 ) “Pengawasan atau kontrol harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Fungsi ini dilakukan oleh manajer sektor publik terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam satuan atau unit kerja”.

Kontrol diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.”

Suprihanto (2012, hal. 101) pengertian pengawasan adalah: “Tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan.”

Pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perencanaan. Dengan demikian fungsi pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan.

Manullang (2014, hal. 173) mengemukakan: “Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan pengamatan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan akan dapat segera diketahui dengan cepat sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

#### **b. Karakteristik Pengawasan**

Fungsi pengawasan mencakup pengukuran keadaan yang sesungguhnya dengan standar yang dapat dipakai untuk mengkoordinir kegiatan organisasi, memfokuskannya ke arah yang tepat dan memudahkan tercapainya keseimbangan dinamis.

Handoko (2013, hal. 373) Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat.  
Informasi tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data tidak akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat Waktu  
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh  
Infomasi harus mudah di fahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standart paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik secara ekonomis.  
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional  
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi  
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja dengan organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi akses atau kegagalan dan keseluruhan operasi dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel  
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional  
Sistem pengawasan harus efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi.  
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau badan organisasi yang bersangkutan. Mereka mengawasi kegiatan-kegiatan dan memahami serta menguasai sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan. Tanpa pengertian dan pemahaman yang demikian, sistem pengawasan yang ditetapkan tidaklah efektif sifatnya.

### **c. Tipe-Tipe Proses Pengawasan**

Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan

datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Menurut Handoko (2013, hal. 361) ada tiga dasar jenis penggolongan pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (*feedforward control*)  
Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan, dan koreksi dilakukan sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*)  
Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*)  
Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau badan organisasi yang bersangkutan. Mereka mengawasi kegiatan-kegiatan dan memahami serta menguasai sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan. Tanpa pengertian dan pemahaman yang demikian, sistem pengawasan yang ditetapkan tidaklah efektif sifatnya.

Sedangkan pendapat Herujito (2012, hal. 249) mengelompokkan tipe-tipe pengawasan dalam empat (4) jenis yaitu:

1. Pengendalian Pra Tindakan (*Pre Action Control*).  
Menurut konsep pengendalian, suatu tindakan bias diambil bila sumber daya manusia, bahan dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah dan mutu yang tepat

2. Pengendalian Kemudi (*Steering Controls*) atau Pengawasan Umpan Maju (*Feedforward Control*).  
Metode ini dibentuk untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standard atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi di depan. Bila pemimpin melihat adanya penyimpangan dia dimungkinkan untuk melakukan koreksi, sekalipun kegiatan belum selesai dilakukan. Pengendalian ini efektif bila pemimpin pada waktu yang tepat dapat memperoleh informasi yang akurat.
3. Pengendalian Secara Secara Skrining atau Pengendalian Ya/Tidak (*Screening or Yes/No Controls*)  
Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, ketika pengamanan terhadap resiko tindakan manajer sangat diperhatikan. Metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan
4. Pengendalian Purna Karya (*Post Action Controls*)  
Metode pengendalian digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengendalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu pelaksanaannya ditetapkan.

### **3. Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak Reklame**

Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menurut Hulu (2012, hal.45) “Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia”.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Reklame, Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.

Setiap perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Penataan reklame diatur menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kawasan (lokasi).

#### **b. Jenis-Jenis Pajak Reklame**

Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk jenis-jenis reklame berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2007 tentang Reklame adalah sebagai berikut :

- 1) Reklame papan (billboard/baliho/neon box/megatron/videotron)
- 2) Reklame kain
- 3) Reklame selebaran
- 4) Reklame melekat/stiker/poster
- 5) Reklame kendaraan
- 6) Reklame udara
- 7) Reklame slide atau reklame film
- 8) Reklame peragaan
- 9) Reklame berjalan
- 10) Reklame suara

Mardiasmo (2009, hal.134) Efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat

dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat diuraikan berikut ini , hal.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Taufan Sufatriansa Awal (2017) Skripsi Universitas Halu Oleo	Analisis Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak reklame di Kota Kendari masih kurang optimal dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Kendari.
2	Zulia Hanum (2012) Skripsi UMSU	Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara	Anggaran penerimaan pajak daerah yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik.
3	Heri Ramdhani (2010) Skripsi UMS	Peranan Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut	Pengawasan terhadap penerimaan pajak reklame sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh

			karena itu peranan Badan Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak reklame ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
4	Triski Intan Meylani Lengkong (2012) Vol 11 No. 1	Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bitung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas Pajak Reklame tahun 2011, 2012 dan 2013 mendapat kategori "Sangat Efektif", sedangkan tahun 2014 dengan kategori "Efektif". Berdasarkan perhitungan data historis, potensi penerimaan Pajak Reklame Kota Bitung pada tahun 2015 adalah sebesarRp 91.376.453.510.
5	Nio Anggun Sripradita (2014) ISSN: 1411-0229	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Hasil dari penelitian ini yaitu pajak reklame di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 111,02% dan rata-

			rata efektivitas PAD periode 2008- 2012 sebesar 125,07%
--	--	--	--

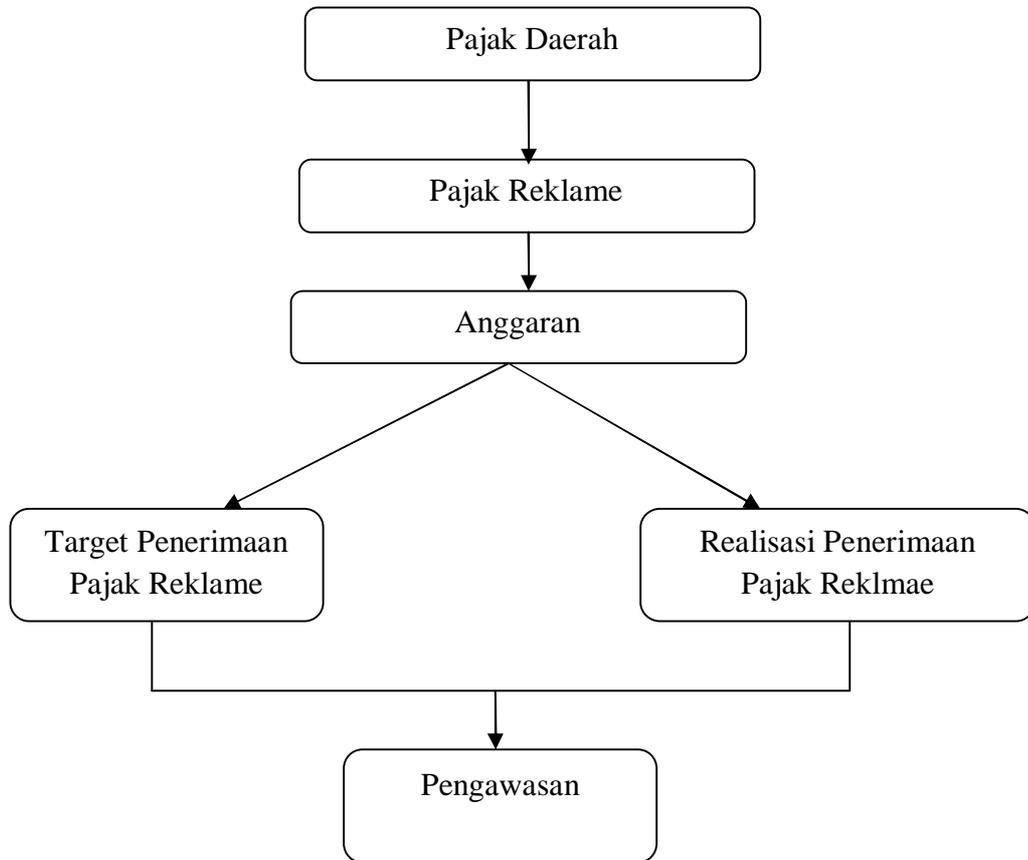
## **B. Kerangka Berfikir**

Pendapatan Asli Daerah yang salah satu sumbernya adalah Pajak Reklame, merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk mewujudkan pembangunan daerah. Pajak reklame juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan.

Pemungutan dalam pajak reklame dilakukan tidak sembarangan, yakni sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan yang tidak mempengaruhi reklame tersebut seperti dari segi nilai sewa, dan melalui letak strategis reklame. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi pembangunan daerah.

Menurut Julita dan Jufrizen (2014, hal 7) Anggaran adalah “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Pengawasan merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian. Adapun yang perlu dianalisa dalam penelitian ini adalah anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Tujuan utama dari pemberian definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah

1. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.
2. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut
3. Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.  
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan

corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian di lakukan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Jalan T. Amir Hamzah Stabat

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus sampai Oktober 2018.

**Tabel III-1. Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018												
	Agt				Sept				Oktober				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. Pengajuan judul	■												
2. Pembuatan Proposal		■	■	■									
3. Bimbingan Proposal					■								
4. Seminar Proposal						■							
5. Pengumpulan Data							■						
6. Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■	
7. Sidang Meja Hijau													■

### D. Jenis Dan Sumber Data

#### 1. Kuantitatif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka seperti data anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame.

#### 2. Sekunder

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari

perusahaan berupa data tertulis, seperti laporan anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Dokumentasi**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame.

### **2. Wawancara**

Yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam organisasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan materi pembahasan. .

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data laporan pendapatan asli daerah yang mengenai anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame. kemudian ditarik kesimpulan dari data laporan keuangan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan menganalisis perputaran piutang dalam meningkatkan laba bersih. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data anggaran dan realisasi pajak reklame
2. Mengamati data anggaran dan realisasi pajak reklame

3. Menganalisis anggaran dan realisasi pajak reklame dengan mengaitkan teori dan hasil penelitian yang relevan
4. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data

##### a. Data Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Untuk melihat anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Stabat dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel IV.1**

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Stabat Tahun 2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih ( Dalam Rupiah )</b>
2015	592.759.706.798	567.805.891.385,46	-24.953.815.412,54
2016	610.439.739.490	573.201.021.262,92	-37.238.718.227,08
2017	676.540.322.667	658.060.502.765,46	-18.479.819.901,54
Rata-Rata	586.066.321.528	561.573.850.623	-24.492.470.905

Sumber: Data Pendapatan Daerah Pemda Stabat (2018)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai terendah realisasi pendapatan daerah terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 465.868.953.787 dan nilai tertinggi terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 658.060.502.765,46 dengan nilai rata-rata pendapatan daerah yang diterima dari tahun 2012-2106 sebesar 561.573.850.623.Untuk selisih antara anggaran pendapatan daerah dan realisasi yang terendah terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar -18.488.701.753,50 dan selisih tertinggi terdapat pada tahun -37.238.718.227,08 dengan nilai rata-rata sebesar -24.492.470.905.

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dilihat selama lima tahun terakhir bahwa pada tahun 2015-2017 tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat pemerintah Kota Stabat, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kota Stabat dalam menghasilkan pendapatan daerah belum baik. pentingnya pendapatan sebagai sumber keuangan Pemerintahan Kota Medan, Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan

#### **b. Pajak reklame**

Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah bagi pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan. Bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Berikut adalah data pajak reklame Pemda Stabat periode 2015-2017 :

**Tabel IV.2**  
**Data Anggaran Pajak reklame Pada Kota Stabat Tahun 2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
2015	163.107.811	143.520.000	87
2016	216.659.656	197.042.000	80
2017	269.333.925	250.916.160	75

**Sumber :** Data Pendapatan Daerah Pemda Stabat (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai terendah untuk realisasi pajak reklame terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 446.140.831.521,00, untuk nilai tertinggi pada pajak reklame terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar

667.852.412.254, untuk nilai rata-rata pajak reklame yang dikeluarkan oleh Pemda Stabat dari tahun 2015-2017 yaitu sebesar 527.481.482.987. Pada nilai selisih pajak reklame terendah terdapat pada tahun 71.521.444.701,00, sedangkan selisih tertinggi terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 123.043.950.012,40

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat dari tahun 2015-2017 nilai realisasi pajak reklame tidak melebihi nilai anggaran pajak reklame, hal ini menunjukkan bahwa Pemda Stabat sudah dapat mengelola anggaran pajak reklame dengan baik sehingga belanja yang dikeluarkan tidak melebihi dari nilai anggaran yang sudah disediakan.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif dalam memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

## 2. Analisis Data

**Tabel IV.1**

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Stabat Tahun 2015-2017**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2015	163.107.811	143.520.000	87
2016	216.659.656	197.042.000	80
2017	269.333.925	250.916.160	75

Sumber: Data Pendapatan Daerah Pemda Stabat (2018)

Pada tahun 2015 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 489.170.253.019 sedangkan realisasi yang didapat lebih rendah sebesar Rp 465.868.953.787 dan selisihnya sebesar Rp -23.301.299.232, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial belum baik karena nilai realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran.

Pada tahun 2013 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 561.421.585.668 sedangkan target yang didapat lebih besar sebesar Rp 542.932.883.914,50 dan selisihnya sebesar -18.488.701.753,50. hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial belum baik karena nilai realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran.

Pada tahun 2014 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 592.759.706.798 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp 567.805.891.385,46 dan selisihnya sebesar -24.953.815.412,54, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial belum baik karena nilai realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran.

Pada tahun 2015 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 610.439.739.490 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp 573.201.021.262,92 dan selisihnya sebesar -37.238.718.227,08, hal ini

menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial belum baik karena nilai realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran.

Pada tahun 2016 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 676.540.322.667 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp 658.060.502.765,46 dan selisihnya sebesar -18.479.819.901,54, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial belum baik karena nilai realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran.

Pada tahun 2012 pajak reklame dengan nilai anggaran sebesar Rp 517.662.276.222 sedangkan realisasi yang didapat lebih rendah sebesar Rp 446.140.831.521,00 dan selisihnya sebesar Rp 71.521.444.701,00, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial sudah baik karena nilai realisasi pajak reklame tidak melebihi anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

Pada tahun 2013 pajak reklame dengan nilai anggaran sebesar Rp 595.503.706.955 sedangkan target yang didapat lebih besar sebesar Rp 472.459.756.942,60 dan selisihnya sebesar 123.043.950.012,40. hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial baik karena nilai realisasi pajak reklame tidak melebihi anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

Pada tahun 2014 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 691.911.813.384 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp 571.815.142.219,50 dan selisihnya sebesar 120.096.671.164,50, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial baik karena nilai realisasi pajak reklame tidak melebihi anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

Pada tahun 2015 pajak reklame dengan nilai anggaran sebesar Rp 553.800.562.782 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp

479.139.271.997 dan selisihnya sebesar 74.661.290.785,00, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial baik karena nilai realisasi pajak reklame tidak melebihi anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

Pada tahun 2016 pajak reklame dengan nilai anggaran sebesar Rp 749.075.353.800 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp 667.852.412.254 dan selisihnya sebesar 81.222.941.546,00, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial baik karena nilai realisasi pajak reklame tidak melebihi anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

Diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kota Stabat mengalami kenaikan dan penurunan, dari beberapa tahun dimana rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2003).

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. *Sutrisno (1984: 200)* pendapatan asli

daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah

## **B. Pembahasan**

### **1. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Langkat**

Dalam upaya mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuannya tersebut. Maka anggaran sangat diperlukan dalam suatu perusahaan yang berfungsi sebagai alat pengawasan.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dalam merealisasikan pajak reklame belum maksimal, terlihat dari tahun 2015 s/d 2017 belum mampu tercapainya target atau rencana yang telah ditetapkan.

Adapun prosedur penagihan pajak daerah di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Mendistribusikan SSPD kepada petugas pemungut pajak daerah
2. Melakukan pemungutan pajak ke lokasi pajak wajib pajak
3. Menyerahkan uang hasil pungutan beserta tembusan SSPD
4. Merekap hasil tagihan pajak dan menyerahkan uang hasil tagihan pajak
5. Pengarispan tembusan SSPD

6. Mencocokkan jumlah uang dengan SSPD
7. Melakukan penyetoran hasil penagihan ke bank
8. Menyimpan bukti setor bank

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat selama lima tahun terakhir bahwa pada tahun 2015-2017 tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat pemerintah Kota Stabat

Menurut Halim (2011: 20) Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik.

Menurut Siagian (2012:259), “Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam opsional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi dengan tingkat efektifitas yang setinggi mungkin.”

Nafarin (2011, Hal 30) Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara - Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) - Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2010) Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan dengan baik.

## **2. Penyebab Tingkat Penerimaan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Langkat Pada Tahun 2013 Sampai 2017 Tidak Mencapai Target Yang Telah Ditetapkan**

Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut. Pendapatan asli daerah itu, dianggap sebagai alternatif dalam memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Dapat diketahui dari hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan anggaran pendapatan asli daerah disebabkan oleh retribusi daerah

yang tidak mencapai target dari tahun 2012 s.d 2016 dimana setiap tahunnya presentase anggaran dibawah 100 % hal ini lebih kecil dari standar kinerja manajerial.

Hasil penelitian ini secara umum mampu menjawab rumusan masalah penelitian dimana jawaban dari setiap rumusan masalah adalah disebabkan oleh adanya penurunan dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah yang sah yang belum dapat memenuhi target setiap tahunnya.

Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang seperti diharapkan. Kinerja manajerial adalah seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok. Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi.

Berdasarkan temuan penelitian ini seharusnya pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Stabat harus bekerja sama antar bidang anggaran yang akan diajukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada DPRD yang tugasnya melakukan persetujuan anggaran. Anggaran Pendapatan

yang disusun terlebih dahulu menentukan dasar-dasar penyusunan anggaran melalui tahapan-tahapan persetujuan anggaran pendapatan sebagai berikut:

- a. Berpedoman kepada pengalaman-pengalaman masa lalu dan prediksi masa yang akan datang.
- b. Menyelenggarakan konfirmasi data dengan masing-masing unit pelaksana dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Stabat berdasarkan sasaran dukungan sebagai penjabaran dari target keseluruhan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Menyampaikan laporan konsep rencana anggaran pendapatan setelah disesuaikan dengan hasil konfirmasi data untuk memperoleh arahan lebih lanjut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil pembahasan maka dapat dilihat bahwa anggaran belum berjalan dengan baik sebagai alat pengawasan pajak reklame hal ini disebabkan karena setriap tahunnya realisasi pajak reklame tidak mencapai target anggaran pajak reklame.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya nilai dari pendapatan asli daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah yang sah yang belum dapat memenuhi target setiap tahunnya.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian bagi instansi terkait adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Stabat agar terus meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi daerah disamping itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi daerah sehingga lebih baik.

2. Sebaiknya perusahaan meningkatkan pengawasan anggaran pajak reklame yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Langkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Syam Kusufi (2013), *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad Yani (2009), *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi Keempat Jakarta: Rajawali Pers.
- Ais Zakiyudin (2016), *Manajemen Bisnis. Edisi Pertama*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014), *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkeni*. Edisi Pertama, Yogyakarta:
- Andi Baldrice Siergar (2015), *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Pertama Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN.
- Andi Mardiasmo (2009), *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Keempat*, Yogyakarta:
- Andi Nafarin (2009), *Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat
- Bastari Dkk (2015), *Perpajakan Teori dan Kasus*. Perdana Publishing
- Darsono dan Ari Purwanti (2008), *Penganggaran Perusahaan. Edisi Pertama*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hani Handoko (2013), *Manajemen. Edisi Kedua* BPFE Yogyakarta
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan. Edisi revisi*, Yogyakarta:
- Nur Riza Utiahman Dkk (2015), *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon*. Jurnal Volume 16.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011. *Tentang Pajak Reklame*.
- Rizka Novianti Pertiwi Dkk (2014), *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)*. Jurnal Volume 3.

Siahaan, Marihot Pahala (2010), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi Cetakan Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers

Siti Resmi (2011), *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Ketujuh Buku Pertama*, Jakarta : Salemba Empat.

Tatjana Nabillah (2016), *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Parkir Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi.

Usman Effendi (2014), *Asas Manajemen. Edisi Pertama Cetakan Pertama*, Jakarta Rajawali Pers.

Waluyo (2009), *Perpajakan Indonesia. Edisi Kesembilan Buku Pertama*, Jakarta: Salemba Empat.

Yeni Ernita (2016), *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **BASTAR AGUNG PRAYOGA**  
N.P.M : **1405170784**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
Judul Skripsi : **ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN  
PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar dari **DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT** kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018  
Saya yang menyatakan,



**BASTRA AGUNG PORAYOGA**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Bastar Agung Prayoga  
NPM : 1405170784  
Tempat dan tanggal lahir : Tamora, 29 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Suasa Tengah Pasar 4 Mabar  
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara

### Nama Orang Tua

Nama ayah : Suherlan  
Nama Ibu : Nuraidah  
Alamat : Aliantan, Rokan Hulu Riau

### Pendidikan Formal

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. SDN 048 KAMPAR              | 1998-2005 |
| 2. SMPN 02 ROKAN HULU          | 2005-2008 |
| 3. SMKS PANCA DHARMA SIDIMPUAN | 2009-2012 |

Medan, Oktober 2018

Bastar Agung Prayoga



# DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Jl. T. Amir Hamzah No.1 Stabat No. Telepon (061) 8912043.

## ANGGARAN DAN REALISASI PAJAK REKLAME KABUPATEN LANGKAT PERIODE 2015-2017

	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah 2015
Geceangan	19.342.713,63	19.283.357,41	10.570.390,43	19.578.390,52	10.214.379,67	19.726.491,00	10.981.459,28	10.342.317,60	12.189.023,51	15.921.812,40	11.516.540,65	12.576.915,31	163.107.811,39
Loggagan	12.510.400,00	9.872.360,00	9.112.432,27	17.500.423,70	8.125.666,67	18.250.321,63	8.079.479,59	5.126.732,49	13.210.427,37	14.672.421,00	10.901.473,42	11.326.921,60	143.320.000,00
Malikah	-6.832.313,63	-411.057,41	-1.465.958,74	-2.077.266,82	-2.097.713,00	-1.475.169,37	-2.001.979,39	-1.215.989,19	1.021.403,86	-1.255.411,40	-615.067,23	-1.169.993,71	-19.587.811,39

	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah 2016
Geceangan	15.576.432,00	10.932.671,23	12.141.762,41	18.521.458,71	16.924.302,17	17.121.321,00	19.409.300,50	22.937.453,25	21.112.391,43	22.911.076,52	20.734.998,28	18.333.235,00	215.569.655,00
Loggagan	14.316.476,00	9.572.360,67	11.930.166,87	17.138.720,00	15.201.976,18	16.742.721,27	18.355.099,59	20.511.952,03	20.088.576,44	20.102.426,97	16.572.421,18	16.540.097,73	197.042.000,00
Malikah	-1.259.956,00	-1.360.294,96	-221.599,74	-1.382.738,71	-1.722.725,99	-379.199,73	-1.054.703,11	-2.425.501,25	-1.043.814,99	-2.811.480,55	-6.152.577,10	-1.793.143,27	-19.617.655,00

	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah 2017
Geceangan	20.475.362,49	21.625.281,92	20.911.431,13	22.031.489,17	20.531.672,00	22.319.102,67	21.936.260,40	25.981.670,54	22.415.732,39	20.663.466,21	22.523.871,00	25.824.585,00	269.333.925,00
Loggagan	19.241.303,64	19.801.750,26	19.296.464,57	21.303.651,32	18.540.270,00	19.042.709,01	23.296.289,15	24.193.548,25	20.332.976,28	21.296.267,47	21.182.561,36	24.880.452,74	250.916.160,00
Malikah	-2.239.058,65	-2.127.551,66	-1.624.566,54	-907.697,85	-1.993.402,00	-3.276.393,66	-839.975,25	-1.780.122,39	-2.082.756,11	632.000,00	-1.441.309,64	-944.132,26	-18.477.765,00

Ka. Dinas Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat



H. Sunardi  
196909031001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

STANDAR OPERASIONAL PENAGIHAN PAJAK DAERAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Formulir
		Bidang Penagihan			
		Seksi penagihan dan perhitungan	Petugas Pungut	Seksi Pembukuan dan Bendahara	
1	Mendistribusikan SSPD kepada petugas pemungut pajak daerah	1		SSPD	
2	Melakukan pemungutan pajak ke lokasi pajak wajib pajak		2	Tembusan SSPD	
3	Menyerahkan uang hasil pungutan beserta tembusan SSPD	3		Tembusan SSPD	
4	Merekap hasil tagihan pajak Menyerahkan uang hasil tagihan pajak	4		Rekap hasil penagihan	
5	Pengarsipan tembusan SSPD		5		
6	Mencocokkan jumlah uang dengan SSPD			Buku register	
7	Melakukan penyetoran hasil penagihan ke bank	7		Bukti Setor Bank	
8	Menyimpan bukti setor bank			Bukti Setor Bank	





**PEREMINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
		2015	2015	
1	<b>PENDAPATAN</b>	733.140.290.623,00	702.016.061.524,30	89,95
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	592.759.705.798,00	567.805.891.368,00	89,18
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	330.718.513,00	308.123.452.172,07	103,35
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	135.510.480.000,00	127.839.052.517,86	62,79
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.691.162.561,00	11.727.355.511,57	100,31
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sali	135.800.754.019,00	137.271.000.720,78	100,34
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.944.778.256.880,00	1.716.727.194.630,00	88,38
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.414.557.874.786,00	1.422.441.737.194,00	100,56
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	254.354.427.000,00	273.598.629.571,00	103,53
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.907.843.785,00	794.913.183,00	41,67
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.056.691.104.000,00	1.066.353.555.440,00	99,97
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	81.594.580.000,00	81.594.600.000,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	175.020.949.000,00	172.402.749.500,00	98,50
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	175.020.949.000,00	172.402.749.500,00	98,50
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	355.199.433.074,00	123.882.707.936,00	34,88
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	355.199.433.074,00	123.356.108.778,00	34,74
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	486.599.158,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	27.892.440.000,00	33.559.267.650,00	120,32
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	100,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	23.042.440.000,00	28.709.267.650,00	124,59
2	<b>BELANJA</b>	3.395.728.853.449,00	3.032.799.976.733,88	89,31
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2.605.465.598.005,00	2.349.993.185.530,86	90,16
2.1.1	Belanja Pegawai	1.559.817.328.725,00	1.561.246.141.761,00	94,12
2.1.2	Belanja Barang	750.595.742.263,00	620.327.553.596,45	82,64
2.1.3	Belanja Bunga	2.368.936.100,00	2.043.903.086,43	86,28
2.1.5	Belanja Hibah	147.063.675.000,00	133.372.516.167,00	90,68
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	46.433.034.917,00	31.836.796.000,00	68,56
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.166.667.000,00	1.155.254.900,00	99,97
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	782.263.268.444,00	681.894.041.203,00	87,17
2.2.1	Belanja Tanah	26.302.541.400,00	4.671.130.200,00	17,75
2.2.2	Belanja Perbaikan dan Mesin	199.676.672.749,00	156.457.046.286,00	78,37

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2011	REALISASI 2011	(%)
2.2.4	Belanja Jekay, Ingsai dan Jaringan	409.049.739.100,00	381.751.393.285,00	93,33
2.2.5	Belanja Ases. Terapi Lainnya	10.821.431.024,00	10.414.233.100,00	96,24
2.3	<b>DELANCA TAK TERDUGA</b>	7.000.000.000,00	922.750.000,00	13,18
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	922.750.000,00	13,18
3	<b>PEMBAYAAAN</b>			
3.1	<b>PEREMPUAN DAERAH</b>			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	369.335.391.311,76	395.963.213.531,62	104,79
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	363.989.219.541,75	381.195.140.534,56	104,73
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	4.346.171.770,00	4.772.072.997,04	109,80
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	55.746.828.485,76	15.116.683.748,72	27,12
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	38.969.039.585,00	0,00	0,00
3.2.4	Pembayaran Utang Kepada Rekanan/Kontraktor	14.154.000.000,76	14.153.888.748,72	100,00
		2.603.788.900,00	952.595.000,00	36,98
	<b>PEMBAYAAAN NETTO</b>	312.588.562.826,00	370.851.329.782,90	118,61
	<b>SISA LEBIH PEMBAYAAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	80.638.314.473,32	0,00

LAMPIRAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJAU DAERAH



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016		
		ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)
1	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	783.140.290.623,00	742.586.961.424,30	88,95
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	610.439.739.490,00	573.201.021.262,32	99,18
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	585.029.048.289,00	604.607.263.594,07	103,35
1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	376.939.628.894,00	236.694.879.407,86	62,79
1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.691.162.561,00	11.727.365.511,57	100,31
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.809.798.019,00	137.271.000.720,78	100,34
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.944.728.256.860,00	1.718.727.194.630,00	88,38
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.414.557.874.786,00	1.422.441.737.194,00	100,56
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	264.364.427.000,00	273.696.668.571,00	103,53
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.907.943.786,00	794.913.183,00	41,67
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.066.691.104.000,00	1.056.363.556.440,00	99,07
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	61.594.500.000,00	81.594.600.000,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	175.020.949.000,00	172.402.749.500,00	98,50
1.2.2.2	Dana Penyusutan	175.020.949.000,00	172.402.749.500,00	98,50
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	175.020.949.000,00	172.402.749.500,00	98,50
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	355.199.433.074,00	123.082.707.936,00	34,86
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	355.199.433.074,00	486.599.158,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	27.892.440.000,00	33.550.267.650,00	120,32
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	100,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	23.042.440.000,00	28.700.267.650,00	124,59
2	<b>BELANJA</b>	3.395.728.853.449,00	3.032.799.676.733,88	89,31
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2.606.465.588.005,00	2.349.993.185.530,88	90,16
2.1.1	Belanja Pegawai	1.658.817.329.725,00	1.561.246.141.761,00	94,12
2.1.2	Belanja Barang	750.595.742.263,00	620.327.563.596,49	82,64
2.1.3	Belanja Bunga	2.368.939.100,00	2.043.903.086,43	86,28
2.1.5	Belanja Hibah	147.083.875.000,00	133.372.516.187,00	90,68
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	46.433.034.917,00	31.036.796.000,00	66,86
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.166.667.000,00	1.166.264.900,00	99,97
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	789.263.265.444,00	681.804.041.203,00	87,17
2.2.1	Belanja Tanah	26.302.541.400,00	4.671.130.200,00	17,76
2.2.2	Belanja Perbaikan dan Mesin	199.676.672.748,00	165.467.046.385,00	82,87
2.2.3				

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)
2.2.4	Belanja Jalan, Tripas dan Jambangan	409.049.739.100,00	381.751.393.285,00	93,33
2.2.5	Belanja Ases. Tetap Lainnya	10.321.431.024,00	10.414.233.100,00	96,24
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	7.000.000.000,00	922.750.000,00	13,18
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	922.750.000,00	13,18
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(312.598.552.625,00)	(230.213.015.309,59)	92,94
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	368.335.391.311,76	385.968.213.531,62	104,79
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SIPA)	363.989.219.541,76	381.196.140.534,98	104,73
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	4.346.171.770,00	4.772.072.997,04	109,80
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	55.746.828.485,76	15.116.983.743,72	27,12
3.2.2	Penyetaraan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	38.999.039.585,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pajak Utang	14.154.000.000,76	14.153.888.748,72	100,00
3.2.4	Pembayaran Utang Kepada Rekanan/Kontraktor	2.603.788.900,00	962.995.000,00	36,98
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	312.598.552.625,00	370.951.329.782,90	118,64
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	80.638.314.473,32	0,00

LAMPAIL REALISASI ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA DAERAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 127/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/8/2018

Nama Mahasiswa : Bastar Agung Prayoga  
 NPM : 1405170784  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Perpajakan  
 Tanggal Pengajuan Judul : 7/8/2018  
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor ....., atau;  
 Alternatif judul lainnya.....  
 (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
 Nama Dosen pembimbing : Nehsan Abdullas (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan  
Proses Reklame Pada Dinas Pendapatan Asli  
Daerah Kabupaten Langkat (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, .....

Dosen Pembimbing

Nehsan Abdullas



**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Medan, .....H  
.....20...M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : B A S T A R A G U N G P R A Y O G A

NPM : 1 4 0 5 1 7 0 7 8 4

Tempat.Tgl. Lahir : T A M O R A 2 9 - 0 6 - 1 9 8 3

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J a i a n S u a s u P a s a r a  
M a b a r e

Tempat Penelitian : D i n a s p e n d a p a t a n A s l  
i p a e r a h k a b u p a t e n  
L u n g k a t

Alamat Penelitian : J a i a n T . A m i r h a m z a h  
S t a b a t

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
  
24/5.2018  
P. TRIANG SABAGIH SE. M.Si

Wassalam  
Pemohon  
  
BASTAR AGUNG PRAYOGA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 127/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/8/2018

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 7/8/2018

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bastar Agung Prayoga  
NPM : 1405170784  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Biaya Modal Belum Dapat Meminimalkan Pengurangan Pajak  
Rencana Judul : 1. Analisis Biaya Modal Dalam Meminimalkan Pengurangan Pajak  
2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Hindrance  
3. Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kecurangan Wajib Pajak

Objek/Lokasi Penelitian : PT. Arpeni Pratama Ocean Line

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Bastar Agung Prayoga)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

NAMA MAHASISWA : BASTAR AGUNG PRAYOGA  
NPM : 1405170784  
JURUSAN : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PAJAK  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN  
PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
11/09/18	Di terima - teori tak mendukung - latar belakang masalah perbaiki		
20/09/18	Di terima - latar belakang masalah - teori - cara kutipan & penulisan perbaiki		
20/09/18	Acc Seminar proposal		

Medan, September 2018

Diketahui/Disetujui  
Ketua Jurusan

Pembimbing Proposal

IKHSASAN ABDULLAH, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 24 September 2018* telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi  
berangkan bahwa :

**N a m a** : BASTAR AGUNG PRAYOGA  
**N .P.M.** : 1405170784  
**Tempat / Tgl.Lahir** : TAMORA, 29-06-1993  
**Alamat Rumah** : JLSUASA MABAR PASAR 4  
**JudulProposal** : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PAJAK REKLAME  
PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
ul	
l	Fenomena lebih jelaskan data pendukung identifikasi masalah rumusan masalah masalah penelitian
ll	terti, disesuaikan kerangka teoritik penelitian terdahulu
lll	definisi operasional penelitian terdahulu. teknik pengumpulan data
nya	Sistematisa Penulisan, Daftar Pustaka
impulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 24 September 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

IKHSAN ABDILLAH, SE, M.Si

Pembanding

DR.EKA NURMALASARI, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari  
Senin, 24 September 2018 menerangkan bahwa:

Nama : BASTAR AGUNG PRAYOGA

N .P.M. : 1405170784

Tempat / Tgl.Lahir : TAMORA, 29-06-1993

Alamat Rumah : JLSUASA MABAR PASAR 4

Judul Proposal : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PAJAK  
REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
LANGKAT

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan  
pembimbing : *Ikhsan Abdullah, SE-M.Si 20-2018 870*

Medan, 24 September 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Pembanding

DR.EKA NURMALASARI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Cerdas & Terpercaya

Setiap surat ini agar disebutkan tanggalnya

Nomor : **453/II.3-AU/UMSU-05/F/2018**  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RISET**

Medan, 14 Muharram 1440 H  
24 September 2018 M

Kepada :  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. LANGKAT**  
Jln. T. Amir Hamzah, Stabat  
Di-  
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : BASTAR AGUNG PRAYOGA  
NPM : 1405170784  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓  
  
HAWA YULI, SE, MM, M.Si.

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Teuku Amir Hamzah Nomor 4 Kwala Bingai, Stabat  
Telepon (061) 8910202 Faks (061) 8910202  
Email : balitbanglangkat@yahoo.co.id Website : Balitbang.kablangkat.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 025/237/Balitbang/2018

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 57 Tahun 2001, Tanggal November 2001 dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Langkat dan setelah membaca/memperhatikan surat dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor 4533/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 24 September 2018 Hal : izin penelitian.

Badan penelitian dan pengembangan Kabupaten Langkat dengan ini memberikan surat rekomendasi penelitian kepada :

Nama : Bastar Agung Prayoga  
NPM : 1405170784  
Prodi : Akuntansi  
Lokasi : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Instansi yang ditetapkan.
  2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi penelitian.
  3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
  4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kabupaten Langkat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian.
  5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Langkat.
  6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian surat ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kabupaten Langkat  
Pada Tanggal : 27 September 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN LANGKAT  
  
K. Amir Hamzah, M.Si  
PEMUDA UTAMA MUDA  
NIP. 19591141984031002

Tembusan :

1. Bupati Langkat sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal



Agung, Cerdas & Terpercaya

Sejawab surat ini agar disebutkan  
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 5489 /IL.3-AU/UMSU-05/F/2018  
Lamp. : -  
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 29 Muharram 1440 H  
09 Oktober 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. LANGKAT**  
di  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : BASTAR AGUNG PRAYOGA  
N P M : 1405170784  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Tembusan :



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Teuku Amir Hamzah Nomor 4 Kwala Bingai, Stabat  
Telepon (061) 8910202 Faks (061) 8910202  
Email : balitbanglangkat@yahoo.co.id Website : Balitbang.kablangkat.go.id

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 075/139/Balitbang/2018

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 57 Tahun 2001, Tanggal November 2001 dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Langkat dan setelah membaca/memperhatikan surat dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor 5489/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Menyelesaikan Riset.

Badan penelitian dan pengembangan Kabupaten Langkat dengan ini memberikan surat rekomendasi penelitian kepada :

Nama : Bastar Agung Prayoga  
NPM : 1405170784  
Prodi : Akuntansi  
Lokasi : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kabupaten Langkat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian.
  2. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Langkat.
  3. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian sureat ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kabupaten Langkat  
Pada Tanggal : 12 September 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Des. ... M.Si

NIP. 1959114 198403 1 002

**Tembusan :**

1. Bupati Langkat sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal



Umu, Cerdas & Terpacaya

jawab surat ini agar disebutkan  
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR : 5490 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal **24 SEPTEMBER 2018**  
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : BASTAR AGUNG PRAYOGA  
N P M : 1405170784  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PAJAK  
REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
LANGKAT  
Pembimbing : **IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **09 OKTOBER 2019**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : MEDAN  
Pada Tanggal : 29 Muharram 1440 H  
09 Oktober 2018 M



Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. *Pertinovaal*